

ABSTRAK

Abu Rizal Ahmad. Haerana. Rusliadi. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pallantikang Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pallantikang Kabupaten Jeneponto berdasarkan sembilan prinsip *Good Governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan dan kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat Desa Pallantikang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pallantikang secara umum telah mengarah pada penerapan sembilan prinsip *Good Governance*. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Prinsip *Rule of Law* diterapkan melalui kepatuhan terhadap RKPDes, APBDes, dan ketentuan pengelolaan Dana Desa. Transparansi diwujudkan melalui musyawarah, papan informasi APBDes, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Prinsip responsivitas terlihat dari penerimaan dan pembahasan aspirasi masyarakat, meskipun belum seluruh kebutuhan dapat direalisasikan. Orientasi pada konsensus dilakukan melalui musyawarah dan penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan anggaran. Prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat, meskipun pemerataan manfaat belum sepenuhnya optimal. Efektivitas dan efisiensi telah diupayakan melalui penggunaan Dana Desa berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran, namun masih terdapat kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi. Akuntabilitas diwujudkan melalui dokumen perencanaan, pencatatan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dokumentasi, dan pengawasan. Sementara itu, visi strategis tercermin dalam upaya pemerintah desa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan infrastruktur. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa relatif baik pada aspek tata kelola dan prosedural, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek responsivitas, pemerataan manfaat, efektivitas pembangunan, keterbukaan informasi, serta keberlanjutan infrastruktur.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, *Good Governance*, Pembangunan Infrastruktur, Desa Pallantikang.